

April, Anas Urbaningrum Bebas Usai Masa Tahanan Dipotong 6 Bulan

BANDUNG (IM) - Anas Urbaningrum segera menghirup udara bebas setelah menjalani hukuman penjara di Lapas Sukamiskin, Bandung, terpidana kasus korupsi megaprojek Hambalang ini akan bebas pada April 2023 mendatang.

"AU (Anas Urbaningrum) bebasnya bulan April," kata Kalapas Sukamiskin, Kunrat Kasmiri, Selasa (28/3).

Akan tetapi, pihaknya belum mengetahui tanggal pasti kebebasan Anas. Sebab, hingga kini, Anas masih menunggu SK Cuti Menjelang Bebas (CMB) yang dikeluarkan oleh Dirjen Pas Kemenkumham.

"Untuk tanggal kita masih nunggu SK CMB dari Dirjen Pas," ujarnya.

Sebelumnya, Anas Urbaningrum terjerat perkara korupsi di KPK. Dia terjerat kasus pembangunan Pusat Pelatihan, Pendidikan, dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang serta tindak pidana pencucian uang pada 2013 silam.

Sidang terhadap mantan politisi Demokrat ini mulai digelar di Peng-

adilan Tipikor Jakarta pada Mei 2018 dan vonis dibacakan pada September 2018.

Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menghukum Anas dengan hukuman 8 tahun penjara. Pada tahap banding, hukumannya dipotong menjadi 7 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Namun, pada tingkat kasasi, hukuman Anas menjadi dua kali lipat, yakni 14 tahun penjara. Adalah Artidjo Alkostar, ketua majelis hakim kasasi yang menjatuhkan hukuman itu.

Atas kasasi tersebut, Anas Urbaningrum mengajukan PK pada Mei 2018. Pada bulan yang sama, Artidjo Alkostar pensiun sebagai hakim MA. Meski PK sudah diajukan sejak Mei 2018, MA baru mengeluarkan putusan pada 30 September 2020.

Dalam vonisnya, MA mengabulkan PK Anas Urbaningrum. MA memotong hukuman Anas Urbaningrum selama 6 tahun sehingga dia hanya menjalani pidana 8 tahun penjara. **han**

Polhukam

FOTO: ANTARA



KETUA UMUM PSSI BERTEMU PRESIDEN JOKOWI

Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan keterangan pers usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (31/3). Pada pertemuan itu Ketua Umum PSSI Erick Thohir melaporkan hasil pertemuan dengan Presiden FIFA Gianni Infantino menyusul dicabutnya status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20.

PIALA DUNIA U-20 BATAL DI INDONESIA

Parpol dan Politisi Siapa Diuntungkan di Balik Penolakan Timnas Israel?

Penolakan atas Timnas Israel oleh sejumlah tokoh politik PDIP, PAN, dan PKS, dinilai sebagai upaya membangun citra positif di hadapan pemilih Islam.

BOGOR (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi aksi dua gubernur yang menolak tim nasional Israel yang akan berlaga di Piala Dunia U-20.

Kedua Gubernur yang menolak kehadiran Tim Israel itu yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali, Wayan Koster.

Menurut Jokowi, perbedaan pandangan dirinya dengan kedua gubernur tersebut merupakan hal yang lumrah di negara Indonesia yang demokratis. Nsamun yang terpenting agar tidak memcam-

pur adukkan urusan politik dengan olahraga sepak bola.

"Ya, ini negara demokrasi. Tapi yang paling penting jangan dicampur adukkan, saya sudah saya sampaikan, jangan dicampur adukkan ada wilayah politik ada wilayah bola," kata Jokowi di kawasan KEK Lido, Bogor, Jawa Barat, Jumat (31/3).

Seperti diketahui bahwa Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023. Situasi terkini di Tanah Air menjadi alasan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) membatalkan peny-

elenggaraan Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia.

Pembatalan itu mencuat buntut penolakan terhadap Timnas Israel. Lantas siapa yang paling diuntungkan di balik penolakan Timnas Israel? Sosok yang menjadi sasaran kemarahan netizen adalah Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali, Wayan Koster. Keduanya sama-sama kader PDIP.

Media sosial Instagramnya diserbu netizen. Ganjar merupakan salah satu tokoh publik yang menolak Timnas Israel berlaga di Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia.

"Jangan harap jadi presiden #tolakanjarjadipresiden," kata akun akzhkoirul*** yang berkomentar di akun Instagram Ganjar yang terkait Pilpres 2024.

"Karena bapak telah merusak mimpi para anak2 muda dalam berkompetisi di piala dunia, saatnya rakyat merusak mimpi bapak jadi presiden ya," kata akun timothyturn***.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Power Ikhwani Arif, saat ini politikus dan partai politik (parpol), tengah berusaha menaikkan popularitas dan elektabilitas. Penolakan atas Timnas Israel yang disuarakan sejumlah tokoh politik PDIP, PAN, dan PKS, dinilai sebagai upaya untuk membangun citra positif di hadapan pemilih Islam.

PKS akan lebih diuntungkan dalam isu ini karena partai yang kini dipimpin Ahmad Syaikhul itu dinilai sebagai partai yang dekat dengan pemilih

Islam. Apalagi sebagian besar pemilih PKS adalah pemilih Islam yang loyal yang pro terhadap Palestina.

Namun tidak demikian dengan pemilih PAN dan PDIP. Pemilih kedua partai ini akan sulit menerima jika ada politikus PAN dan PDIP menolak kedatangan Israel di Indonesia.

Seharusnya PDIP tetap mendukung langkah yang dilakukan pemerintah untuk mendukung Timnas mana pun berlaga di Indonesia.

"Apalagi pemerintah melalui presiden terus mendukung semua negara untuk bisa bertanding di Indonesia, jadi opsi yang dipilih PDIP terkesan bertolak belakang dengan keputusan presiden yang juga merupakan salah satu kader PDIP sendiri," katanya. **han**



FOTO: ANI

SIDANG LANJUTAN HAKIM ELLY TRI PANGESTUTI

Terdakwa kasus suap Elly Tri Pangestuti berjalan keluar usai menjalani sidang lanjutan secara daring di gedung KPK, Jakarta, Jumat (31/3). Wanita yang berprofesi sebagai hakim itu menjalani sidang lanjutan dalam perkara suap jual beli perkara di Mahkamah Agung.

Jaksa Tetap Pada Dakwaannya Terhadap AG Pacar Mario Dandy

JAKARTA (IM) - PN Jakarta Selatan kembali menggelar sidang terdakwa anak AG dalam kasus dugaan penganiayaan David Ozora pada Jumat (31/3).

Sidang ini beragendakan tanggapan Jaksa atas Eksepsi AG. AG pun menjalani persidangan dengan didampingi pengarangannya.

"Didampingi orangtuanya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, dan penasihat hukumnya," ujar Humas PN Jakarta Selatan, Djuyanto pada wartawan, Jumat (31/3).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyampaikan tanggapannya atas eksepsi terdakwa anak AG di kasus dugaan penganiayaan David Ozora, Jumat (31/3).

"Sekali lagi soal pokoknya kita enggak bisa bicara. Tapi mereka membantah dari beberapa poin keberatan kami dan mereka tetap pada dakwaannya," ujar pengacara AG, Mangatta Toding Allo pada wartawan, Jumat (31/3).

Menurut Toding, jaksa telah menyampaikan pandangannya terhadap eksepsi yang telah diajukan pihaknya itu. Namun, dia tak bisa membeberkan poin apa saja yang ditanggapi jaksa atas Eksepsinya itu lantaran telah masuk pokok materinya.

"Hari Senin (3 April 2023) nanti akan diagenda-

kan putusan sela dan setelah itu mungkin kalau eksepsi ditolak akan lanjut ke persidangan dan pemeriksaan saksi-saksi," tuturnya.

Mangatta menambahkan, usai putusan sela dibacakan pada Senin, 3 April 2023 mendatang, hakim bakal langsung mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi dari jaksa. Namun, dia belum tahu berapa saksi dan siapa saja yang bakal dihadirkan jaksa nantinya. **mei**

Komisi X DPR Heran Surat Internal Koster soal Penolakan Timnas Israel Bisa Bocor

JAKARTA (IM) - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Andreas Hugo Pereira, mengaku heran mengapa surat internal Gubernur Bali I Wayan Koster kepada pemerintah bisa bocor dan menjadi konsumsi publik.

Hal itu ia sampaikan terkait polemik penolakan terhadap kehadiran Timnas Israel saat Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023. Andreas menilail dalam olahraga event internasional seharusnya melibatkan Kementerian Luar Negeri untuk melakukan lobi-lobi, dalam menyelesaikan persoalan hubungan diplomatik antar negara.

"Surat pak I Wayan Koster itu internal. Kok malah dibocorkan. Seharusnya diselesaikan di internal. Jadi ramai di publik," ujar Andreas, Jumat (31/3).

Akibat kekekruhan tersebut, FIFA melihat pemerintah seperti bertentangan sendiri di dalam. Padahal seharusnya kata Andreas penyelesaian persoalan Timnas Israel tersebut perlu disampaikan ke Kementerian Luar Negeri untuk dicarikan solusinya.

"Permenlu Nomor 3 Tahun 2019 di halaman 45 dan 46 itu diatur. Itu yang tidak dilakukan steering komite dari panitia penyelenggara Piala Dunia U-20. Dituisi atau jalan keluarnya," jelas Andreas.

Ia juga melihat berbagai pernyataan yang menyebutkan jangan mencampur adukkan politik dan olahraga nasional kurang tepat.

"Presiden juga sudah bilang jangan mencampur adukkan olahraga dan politik. Tapi event olahraga itu pasti ada hubungan politik nya karena ada Entitas negara. Sehingga terlihat seolah-olah kita ribut

di dalam," kata Andreas.

Kader PDIP kata Andreas juga banyak yang kecewa dengan keputusan FIFA mencabut status tuan rumah Indonesia dalam Piala Dunia U-20 2023.

"Kader PDIP juga banyak yang kecewa dengan dicabutnya status tuan rumah tersebut," pungkas Andreas.

Sebagaimana diketahui, Indonesia sebelumnya akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 yang diselenggarakan pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) pada Minggu (26/3)

merilis pembatalan drawing Piala Dunia U-20 2023 yang akan digelar di Bali, Jumat (31/3/2023) dengan alasan dibatalkan oleh FIFA karena maraknya penolakan berbagai elemen di Indonesia terhadap kehadiran Timnas Israel.

FIFA pada akhirnya secara resmi mencopot Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023. Keputusan tersebut terkonfirmasi usai pertemuan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan FIFA di Qatar. FIFA kemudian mengumumkan keputusan tersebut di situs resminya, Rabu (29/3) malam. **mei**

PT DISTRIBUSI VOUCHER NUSANTARA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA				
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN				
Tanggal 31 Desember 2022				
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)				
	31 Desember 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2022	31 Desember 2021
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	157.647.542.749	251.973.930.638		
Investasi jangka pendek	1.583.744.253.000	1.499.634.820.000		
Piutang usaha - neto				
Pihak ketiga	16.280.467.010	59.647.212.395		
Pihak berelasi	117.319.741.118	75.054.996.141		
Piutang lain-lain				
Pihak ketiga	3.371.116.936	5.108.555.376		
Pihak berelasi	370.322.640	670.623.000		
Persediaan	132.328.019.994	172.614.763.570		
Uang muka dan beban dibayar di muka	27.137.122.594	27.692.082.295		
Pajak dibayar di muka	2.281.749.767	4.744.955.888		
Piutang pihak ketiga	27.371.048.413	22.970.475.427		
Piutang pihak berelasi - jangka pendek	3.015.398.460	33.764.637.665		
Deposito yang dibatasi penggunaannya	50.000.000.000	52.456.983.750		
Total Aset Lancar	2.122.401.225.916	2.206.333.656.195		
ASET TIDAK LANCAR				
Aset tetap - neto	75.990.133.613	70.740.143.690		
Investasi obligasi	68.000.000.000	-		
Aset takberwujud - neto	24.183.076.862	27.358.883.156		
Aset baik-guna - neto	2.281.749.767	4.436.934.853		
Investasi pada entitas asosiasi	18.998.614.842	22.324.753.482		
Investasi saham	10.356.483.133	10.356.483.133		
Aset pajak tangguhan	8.618.844.946	9.048.856.003		
Goodwill	6.098.739.878	6.098.739.878		
Takliran lagihan pajak penghasilan	840.514.385	2.681.526.452		
Aset tidak lancar lainnya	247.585.272	768.835.273		
Total Aset Tidak Lancar	215.595.722.688	153.815.155.920		
TOTAL ASET	2.337.996.948.614	2.360.148.812.115		
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang bank jangka pendek	105.120.182.371	81.083.974.232		
Utang usaha				
Pihak ketiga	14.979.128.529	9.572.121.444		
Pihak berelasi	6.464.385.708	17.665.176.014		
Utang lain-lain				
Pihak ketiga	5.899.882.433	1.023.431.619		
Pihak berelasi	2.816.326.522	695.529.100		
Utang pajak	2.042.941.047	3.753.100.297		
Utang piutang	9.549.479.757	35.769.919.254		
Deposito pelanggan	20.935.790.334	28.597.189.168		
Utang pihak berelasi				
Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				
Utang bank	7.554.000.000	7.554.000.000		
Utang pembiayaan	107.783.229	27.268.678		
Liabilitas sewa	1.340.592.316	1.533.997.184		
Total Liabilitas Jangka Pendek	176.810.002.246	191.396.988.866		
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				
Utang bank	6.295.000.000	13.849.000.000		
Utang pembiayaan	83.278.675	58.520.445		
Liabilitas sewa	636.993.100	2.446.529.867		
Liabilitas imbalan kerja	4.507.451.751	3.940.101.596		
Total Liabilitas Jangka Panjang	11.522.723.526	20.294.151.908		
TOTAL LIABILITAS	188.332.725.772	211.691.140.774		
EKUITAS				
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Perusahaan				
Modal saham - nilai nominal Rp 50 per saham	71.428.570.000	71.428.570.000		
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1.428.571.400 saham	592.674.751.173	592.674.751.173		
Tambahan modal disetor	(8.829.590.000)	(8.829.590.000)		
Saham treasuri	1.959.079.763	1.959.079.763		
Selisih atas transaksi dengan pihak nonpengendali	410.814.930	527.798.764		
Penghasilan komprehensif lain				
Saldo laba	600.000.000	500.000.000		
Tahap ditentukan penggunaannya	1.443.778.531.773	1.439.633.637.749		
Belum ditentukan penggunaannya				
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Perusahaan	2.102.022.157.639	2.097.894.247.449		
Keperimbangan nonpengendali	47.642.065.203	50.573.423.892		
TOTAL EKUITAS	2.149.664.222.842	2.148.467.671.341		
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	2.337.996.948.614	2.360.148.812.115		

Catatan:

Informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan konsolidasian PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk dan Entitas Anaknyanya tanggal 31 Desember 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Kanaka Paradinjaga, Suhartono (firma anggota jaringan Neria International), auditor independen, dengan opini tanpa modifikasi, sebagaimana tercantum dalam laporan mereka No. 002375/0357/UA/105/1625-1/11/11/2023 tertanggal 30 Maret 2023 yang tidak tercantum dalam publikasi ini. Informasi keuangan tersebut di atas tidak mencakup laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

PENGUMUMAN
Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Dilar Rapat (Sirkuler) PT BERKAH USAHA NUSANTARA, berkedudukan di Kota Bekasi tertanggal 28 Maret 2023, diberitahukan bahwa seluruh saham milik perseroan telah dialihkan/berpindah kepemilikan kepada pemegang saham baru.
Demikian diberitahukan kepada seluruh pihak yang berkaitan harap menghubungi Direksi Perseroan dalam waktu 14 hari sejak pengumuman ini.
Jakarta, 30 Maret 2023
Terlanta
Direksi

Jakarta, 1 April 2023

SE & O
Direksi
PT DISTRIBUSI VOUCHER NUSANTARA TBK